

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 205/III/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor B/851/032/V/2022 tanggal 27 Mei 2022;
 - b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat: Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 1. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang :		dang-undang :	
--------------------	--	---------------	--

- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

MEMU	T	TI S	KAN	
TATTATATO	¥	OD.	121 TT 4	*****

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Bupati ini.

KEDUA

Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.

KELIMA

Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 16 MARET 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR : TANGGAL :

MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	4	NAMA BARANG			
TOYOTA RUSH 1.5 G MT	5	MERK			
BP 141 B		NO POLISI			
MHFE2CJ2K017221	6	NOMOR RANGKA	SPESIFIKASI		
DBV2575		NOMOR MESIN			
2010	7	TAHUN PEROLEHAN JUMLAH			
1 UNIT	80	JUMLAH			
Rp 224.895.000	9	NILAI PEROLEHAN			
224.895.000 Rp 224.895.000 Rp	10	NILAI PENYUSUTAN			
Rp	11	NILAI BUKU			
В	12	KONDISI BARANG			
PENYERAHAN DARI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN	13	KET			

NO

KODE BARANG

KODE REGISTER

1 1.3.02.02.01.02.003

0065

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

1